

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era modernisasi ini banyak terjadi fenomena merosotnya nilai-nilai moral dalam kehidupan remaja di Indonesia. Kasus kenakalan remaja semakin mengkhawatirkan, agar kenakalan remaja ini tidak semakin parah maka perlu adanya bimbingan dan pendekatan secara psikologis. Remaja adalah usia yang dipenuhi dengan semangat yang sangat tinggi tetapi terkadang semangat tersebut mengarah pada suatu yang bersifat negative sehingga sering disebut dengan kenakalan remaja. Masa remaja merupakan masa transisi, dimana terjadi perubahan pada diri remaja baik secara fisik, psikis, maupun secara social (Hurlock, 1973). Pada masa transisi tersebut memungkinkan timbulnya masa kritis pada diri remaja yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang atau kenakalan. Kenakalan di definisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma, menyimpang dari hokum dalam masyarakat, peraturan social, adat, hukum dan agama.

Menurut Kartono kenakalan remaja adalah “Kenakalan Remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang”.

Penyebab kenakalan remaja salah satu diantaranya adalah latar belakang remaja itu sendiri, dimana setiap remaja memiliki lingkungan yang berbeda-beda serta memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda-beda, pergaulan, keluarga, pendidikan yang berbeda-beda pula. Pergaulan yang salah merupakan penyebab terbesar untuk mendorong para remaja melakukan kenakalan remaja. Selain itu keluarga juga menjadi penyebab yang mempengaruhi remaja melakukan kenakalan remaja, keluarga dalam hal ini orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan akhlak dan perilaku anak. Pembinaan orang tua adalah

faktor terpenting dalam memperbaiki dan membentuk generasi yang baik. Begitupun dengan kerusakan moral pada remaja juga tidak terlepas dari kondisi dan suasana keluarga. Kurangnya pendidikan agama juga dikalangan remaja juga dapat menyebabkan para remaja lebih mudah terjerumus pada perbuatan yang tidak baik.

Pendidikan karakter melalui Pendidikan moral adalah suatu kesepakatan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk mengarahkan generasi muda atas nilai-nilai (*values*) dan kebajikan (*virtues*) yang akan membentuknya menjadi manusia yang baik (*good people*) (Nord and Haynes, 2002).

Pendidikan moral memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan budi pekerti dan pendidikan akhlak. Pendidikan moral dimaksudkan agar manusia berajar untuk menjadi bermoral, dan bukannya pendidikan moral (*moral reasoning*) dan pertumbuhan intelegensi sehingga seseorang bisa melakukan pilihan dan penilaian moral yang paling tepat (Zuriah, 2011:21).

Moral dalam Hurlock (Edisi ke-6, 1990):

mengatakan bahwa perilaku moral adalah perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. Moral sendiri berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku moral dikendalikan konsep konsep moral atau peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya.

Menurut Goods menyatakan bahwa pendidikan moral dapat dilakukan secara formal maupun insidental, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Pendapat lain dari Durkheim, menekankan agar pendidikan moral dipindahkan dari lingkungan rumah ke sekolah karena sekolah mempunyai tugas khusus dalam hal moral.

Herman (1972), mengemukakan suatu prinsip yang mendasar, yakni bahwa ” ... *value is neither thought nor cought, is learned*”, yang artinya bahwa sustansi nilai tidaklah semata-mata ditangkap dan diajarkan tetapi lebih jauh, nilai dicerna dalam arti ditangkap, diinternalisasi dan dibakukan sebagai bagian yang melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui belajar. Dan moral, dalam perkembangannya diartikan sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik.

Dalam kehidupan bermasyarakat , pendidikan nilai dan moral sudah berlangsung didalamnya.

PPKn sebagai Mata Pelajaran yang Memiliki Misi adalah Pendidikan Nilai dan Moral, Khusus mengenai pendidikan nilai dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional secara Khusus tidak menyebutkan, namun secara implisit, antara lain tercakup dalam muatan pendidikan kewarganegaraan, yang secara substansif dan pedagogis mempunyai misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Hal itu juga ditopang oleh rumusan landasan kurikulum, yang dalam pasal 36 ayat (3) secara eksplisit perlu memperhatikan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, keragaman potensi daerah dan lingkungan dan peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik. Dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat, dinyatakan dengan tegas bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk antara lain untuk ”mencerdaskan kehidupan bangsa”. Untuk mendapatkan kehidupan bangsa yang cerdas dalam arti yang luas tentu diperlukan warganegara yang cerdas juga dalam arti yang luas. Upaya untuk mencerdaskan warganegara dapat ditempuh melalui program pendidikan nasional, sebagaimana hal tersebut tersurat dalam Pasal 31 UUD 45 ayat (3) (Amandemen keempat 10 Agustus 2002).”

Berkaitan dengan pembahasan diatas bahwa pendidikan nilai dan moral adalah sebuah wadah pembinaan akhlak, maka hal ini perlu adanya pendekatan yang akan membawa siswa atau peserta didik untuk memaknai dan menerpakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Kewarganegaraan atau dikenal juga sebagai Pendidikan kewargaan, civic education, citizen education. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk pendidikan dalam rangka penanaman nilai-nilai dan norma, wawasan kenegaraan, kesadaran hukum, penghargaan dan persamaan, serta bela negara dalam rangka ketahanan nasional. Secara umum, tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan antara lain adalah untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap tanah air, memupuk rasa persatuan dan

kesatuan, menanamkan kesadaran menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rela berkorban demi negara dan bangsa, serta mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara.

Membangun karakter warganegara suatu bangsa perlu adanya upaya yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan orang konstitusi. Ada dua tantangan yang cukup berat untuk membentuk masyarakat yang memiliki karakter di Indonesia. Pertama, tantangan historis, ialah tantangan kondisi masyarakat bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang kehidupan masyarakat yang bersistem kerajaan dan penjajahan (*colonialism, imperialism*). Suatu proses merubah cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dari budaya masyarakat yang telah lama berkehidupan secara feodalistis ke masyarakat demokratis bukan hal yang mudah. Kedua, mempertahankan dan atau memelihara budaya masyarakat dan warganegara yang sedang belajar menjalankan kehidupan demokratis agar secara berkesinambungan ditransformasikan kepada generasi berikut (Sapriya, 2007:12).

Dari kedua tantangan tersebut pembentukan karakter bangsa bisa dilakukan melalui situs kewarganegaraan yaitu salah satunya melalui pesantren. Pendidikan karakter melalui situs-situs kewarganegaraan ini terbagi kedalam dua (2) kelompok, yaitu: 1) pendidikan karakter yang dikelola secara tradisional, dimana manajemen dan metoda yang dilakukan sangat sederhana dan kecenderungan bersifat kaku, seperti kegiatan-kegiatan majelis ta'lim, kegiatan pengajian mingguan atau harian di lingkungan masyarakat, dan sebagainya. 2) pendidikan karakter yang dilakukan secara profesional, dimana pengelolaan, kurikulum, model atau metoda yang dirancang dan dilaksanakan secara lebih baik. Biasanya pendidikan karakter seperti ini dilakukan oleh masyarakat yang secara struktur organisasi, kurikulum serta metoda yang lebih terarah dan terfokus untuk bergerak dibidang, seperti gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Pesantren. (Yuyus Kardiman, 2009).

Tertarik pada pola pembelajaran di pondok pesantren yang menggunakan pendekatan pembiasaan untuk itu memerlukan paradigma yang perlu dikaji secara mendalam sebagai usaha membangun nilai moral Pancasila santri dipondok

pesantren. Pondok pesantren merupakan lingkungan pendidikan yang efektif berbasis islam dalam mengembangkan nilai moral Pancasila kerana mengintegrasikan pembelajaran nilai dalam kesatuan antara kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan diasrama, dan kegiatan di sekolah. Keberhasilan pembelajaran nilai moral Pancasila di pesantren ditentukan oleh keberhasilan dalam pendekatan pembiasaan dalam pendidikan moral Pancasila. Pendidikan di lingkungan pesantren santi asromo berhasil mengembangkan nilai-nilai Pancasila berbasis keislaman seperti menumbuhkan sikap jujur, memiliki komitmen yang kuat, memiliki kemandirian, memiliki rasa tanggung jawab serta memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar yang lebih tinggi.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan, termasuk salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang “*indigenous*” Indonesia. Sejak awal, pesantren bertujuan untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman keseharian, atau disebut tafaqquh fiddin, dengan menekankan pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat. Perwujudan dari tujuan pesantren itu diakui oleh banyak kalangan, bahwa pesantren telah ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan sangat berjasa bagi umat Islam pada masa kolonial, karena tidak sedikit pemimpin bangsa terutama dari angkatan 1945 adalah alumni atau setidak-tidaknya pernah belajar di pesantren (Mastuhu, 1994, p. 3).

Pendidikan pesantren bertujuan menjadi basis penyebaran ajaran-ajaran keagamaan sebagai benteng moral dan mental dalam menghadapi kemajuan teknologi. Dengan adanya keseimbangan antara ilmu keagamaan dan ilmu non-keagamaan dimaksudkan agar dapat membentuk lulusan yang siap dalam menerapkan nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

Pesantren Salah satu lembaga pendidikan yang dianggap mampu mengantisipasi agar remaja kita tidak larut dalam kejahatan akhlak dan mengarahkan mereka agar segala tingkah laku dan tindak tanduknya sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam adalah lembaga pendidikan yang berupa pondok pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya mengajarkan tentang ilmu-ilmu keagamaan saja, akan tetapi di pesantren

juga diajarkan tentang pendidikan moral dan akhlak/tingkah laku yang tidak terdapat di sekolah-sekolah biasa.

Pesantren berasal dari kata “penyantrian” yang memiliki dua arti, yaitu: “tempat santri” atau “proses menjadikan santri”. Menurut istilah, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu keagamaan. Segala sesuatu yang diajarkan di pesantren harus mengandung nilai-nilai agama dan berlandaskan pada agama. Pesantren berdiri atas niat untuk memberikan pendidikan dan pengajaran tentang agama Islam kepada masyarakat, sehingga karenanya pesantren disebut lembaga pendidikan Islam.

Dari sudut ini, nampaknya masyarakat kita tertarik pada pesantren terutama karena pondok pesantren merupakan lembaga yang mendukung nilai-nilai agama yang dikalangan masyarakat terasa amat dibutuhkan untuk bisa mempertahankan tradisi kehidupan beragama, khususnya pada masyarakat pedesaan, selain itu pendidikan di pesantren juga lebih menanamkan sikap disiplin dan bertanggung jawab pada santri. Sedangkan di kalangan masyarakat kota, kebutuhan agama nampaknya lebih banyak dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa pergaulan hidup di kota-kota telah mengalami semacam ”polusi” yang membahayakan perkembangan pribadi anggota masyarakat dan pendidikan anak-anak mereka.

Berangkat dari sinilah peneliti menjadikan pesantren sebagai obyek penelitian, dimana pesantren sebagai laboratorium demokrasimemiliki peranan yang strategis dalam pembentukan nilai dan moral pancasila. Karena pendidikan akhlak dan budi pekerti merupakan jiwa dari pendidikan kewarganegaraan dimana tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menjadikan manusia yang memiliki karakter berbudi, cerdas dan memiliki watak atau sikap yang baik serta dapat mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar itulah yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih jauh, dalam sebuah penelitian yang berjudul “Peranan Pondok Pesantren sebagai Laboratorium Demokrasi dalam Membangun Nilai Moral Pancasila (Studi Deskriptif Di Pondok Pesantren Santi Asromo Islamic Boarding School di Kabupaten Majalengka).

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Semakin merosotnya moral para remaja yang ditandai makin banyaknya kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja.
2. Kurangnya penanaman sikap disiplin pada remaja.
3. Terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh remaja misalnya: tawuran antar pelajaran, penyalahgunaan narkoba, penyimpangan seks, dan lain-lain.

## **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka secara umum penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana peranan pesantren sebagai Laboratorium demokrasi dalam membangun nilai moral Pancasila?

Sedangkan secara khusus penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Mengapa bentuk kegiatan membangun nilai moral Pancasila pada santri perlu dilakukan dalam bentuk ekstrakurikuler, kegiatan di asrama dan kegiatan di sekolah?
2. Mengapa proses pelaksanaan membangun nilai moral Pancasila di pondok pesantren Santi Asromo menggunakan pendekatan pembiasaan dalam berbagai kegiatan di pesantren?
3. Mengapa efektifitas pengembangan nilai moral Pancasila pada santri menggunakan pendekatan pembiasaan dalam berbagai kegiatan di pesantren?

## **D. Tujuan Penelitian**

Wiwit Khairunisa Pratiwi, 2018

*PERANAN PONDOK PESANTREN SEBAGAI LABORATORIUM DEMOKRASI DALAM MEMBANGUN NILAI MORAL PANCASILA*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini secara umum adalah mengetahui peranan pesantren dalam membangun nilai moral santri.

Sedangkan secara khusus penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Mengetahui bentuk kegiatan membangun nilai moral Pancasila dikalangan santri melalui kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan diasrama dan kegiatan dikelas dipondok pesantren Santi Asromo.
2. Mengetahui proses pelaksanaan dalam membangun nilai moral Pancasila di pondok pesantren Santi Asromo.
3. Mengetahui efektifitas pengembangan nilai moral Pancasila pada santri di pondok pesantren Santi Asromo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Dari Segi Teoritis**

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangsih teori dalam hal membangun nilai moral santri melalui peranan pesantren yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran PPKn.

##### **2. Manfaat Dari Segi Kebijakan**

Manfaat kebijakan dari peneltian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan penelitian bagi pemerintah mengenai peranan pesantren dalam membangun nilai moral santri. Karena permasalahan kemerosotan nilai moral remaja dari tahun ketahun semakin banyak terjadi. Apabila permasalahan remaja ini terus menerus di diamkan maka bangsa Indonesia akan hancur karena generasi muda merupakan tonggak kemajuan bagi bangsa Indonesia.

##### **3. Manfaat Dari Segi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Bagi pengurus pondok pesantren; meningkatnya pengetahuan terhadap pengurus pondok pesantren dalam mengetahui cara-cara untuk membangun nilai moral santri.
- b. Bagi santri; meningkatnya kesadaran moral sehingga dapat menjadi kebanggaan orang lain, menjadi penerus bangsa yang memiliki nilai moral yang baik.
- c. Bagi penulis; meningkatkan wawasan, memperoleh pengalaman langsung dan mengetahui peranan pesantren dalam membina nilai moral santri.

## **F. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman penafsiran dalam memperoleh kesatuan arti dan pengertian dari judul penelitian ini, perlu kiranya memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan istilah-istilah sebagai berikut:

### **1. Peranan**

Soerjono Soekanto memaparkan “peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. (Soerjono Soekanto, 1990:268).

### **2. Pondok Pesantren**

Pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe- dan akhiran an, berarti tempat tinggal santri. Soegarda Poerwabakawatja yang dikutip oleh Haidar Putra Daulay, mengatakan pesantren berasal dari kata santri yaitu seseorang yang belajar agama islam, sehingga dengan demikian pesantren mempunyai arti, tempat orang berkumpul untuk belajar agama islam. Ada juga yang mengartikan pesantren adalah suatu lembaga pendidikan islam Indonesia yang bersifat “tradisional” untuk mendalami ilmu tentang agama islam dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian. (2004:26-27).

### 3. Laboratorium Demokrasi

Menurut Emha (2002), laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi atau bidang ilmu lain. Sementara pandangan lain mengenai laboratorium adalah menurut Sukarso (2005), laboratorium ialah suatu tempat dimana dilakukan kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Tempat ini dapat merupakan suatu ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka, misalnya kebun dan lain-lain.

Titik Triwulan Tutik (2010:67) demokrasi secara etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan *cratos* atau *cratos* yang berarti kekuasaan (kedaulatan). Dengan demikian dapat diartikan bahwa demokratis adalah suatu sistem pemerintahan suatu negara yang pemerintahannya dilaksanakan oleh rakyat. Sedangkan demokrasi menurut secara istilah, Joseph A. Schemeter berpendapat bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif suatu rakyat.

Dari kedua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laboratorium demokrasi adalah suatu tempat atau sarana untuk mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu menghargai perbedaan pendapat (*the right of to be different*), kebebasan yang mengaktualisasikan diri, kebebasan intelektual, kesempatan untuk bersaing dalam perwujudan diri sendiri (*self realization*), tempat yang membangun moral, dan tempat yang senantiasa mengajarkan orang untuk selalu mendekatkan diri kepada yang pencipta.

### 4. Nilai

Nilai, menurut Djahiri (1999), adalah

harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Disini, nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku.

Sedangkan menurut Dictionary dalam Winataputra (1989):

nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara instrinsik memang berharga.

## 5. Moral

Kata moral berasal dari bahasa Latin *mos* (jamak *mores*) yang berarti kebiasaan, adat (Bertens, 1993). Moral merupakan suatu standar salah atau benar bagi seseorang (Rogers & Baron, dalam Martini, 1995).

Berns (1997) mengemukakan bahwa”

“moralitas mencakup mematuhi aturan sosial dalam kehidupan sehari-hari dan conscience atau aturan personal seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain”.

Setiono (dalam Muslimin, 2004) menjelaskan bahwa

“menurut teori penalaran moral, moralitas terkait dengan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana orang sampai pada keputusan bahwa sesuatu dianggap baik dan buruk. Moralitas pada dasarnya dipandang sebagai pertentangan (konflik) mengenai hal yang baik disatu pihak dan hal yang buruk dipihak lain. Keadaan konflik tersebut mencerminkan keadaan yang harus diselesaikan antara dua kepentingan, yakni kepentingan diri dan orang lain, atau dapat pula dikatakan keadaan konflik antara hak dan kewajiban

## 6. Nilai Moral Pancasila

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila seperti yang teruang dalam Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 itu adalah sebagai berikut:

1. Nilai Yang Terkandung Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa :
  - a. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
  - b. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.
  - c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

- d. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
2. Nilai Yang Terkandung Dalam Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Bearadab :
- a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban anatar sesama manusia.
  - b. Saling mencintai sesama manusia.
  - c. Mengembangkan sikap tenggang rasa
  - d. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
  - e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
  - f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
  - g. Berani membela kebenaran dan keadilan.
  - h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
3. Nilai Yang Terkandung Dalam Sila Persatuan Indonesia :
- a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
  - b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
  - c. Cinta tanah air dan bangsa.
  - d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
  - e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.
4. Nilai Yang Terkandung Dalam Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan :
- a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
  - b. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain.
  - c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
  - d. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

- e. Dengan itikat baik dan rasa tanggungjawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
  - f. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
  - g. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung-jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
5. Nilai Yang Terkandung Dalam Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
- a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
  - b. Bersikap adil.
  - c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
  - d. Menghormati hak-hak orang lain.
  - e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
  - f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
  - g. Tidak bersifat boros.
  - h. Tidak bergaya hidup mewah.
  - i. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
  - j. Suka bekerja keras.
  - k. Menghargai hasil karya orang lain.
  - l. Bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

### **G. Struktur Organisasi Tesis**

Sistematika penulisan dari penelitian yang berjudul “Peranan Pondok Pesantren sebagai Laboratorium Demokrasi dalam Membangun Nilai Moral Pancasila(Studi Deskriptif Di Pondok Pesantren Santi Asromo Islamic Boarding School di Kabupaten Majalengka)adalah sebagai berikut:

Wiwit Khairunisa Pratiwi, 2018

*PERANAN PONDOK PESANTREN SEBAGAI LABORATORIUM DEMOKRASI DALAM MEMBANGUN NILAI MORAL PANCASILA*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

1. BAB I pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lokasi dan subjek penelitian dan struktur organisasi tesis.
2. BAB II kajian pustaka membahas mengenai tinjauan tentang peranan pondok pesantren sebagai laboratorium demokrasi dalam membangun nilai moral Pancasila.
3. BAB III metode penelitian yang meliputi pendekatan dan metode penelitian, lokasi dan subjek penelitian, persiapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.
4. BAB IV hasil penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.
5. BAB V kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang didalamnya menjawab dari perumusan masalah, sedangkan rekomendasi berisi masukan tertulis kepada pihak sekolah, guru, siswa, orang tua dan peneliti selanjutnya.